



## PENDIDIKAN TERBELAH: TELAAH POSISI PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

MOCH. IQBAL <sup>1</sup>

<sup>1</sup> moch\_iqbal@iainbengkulu.ac.id

<sup>1</sup> Institut Agama Islam Negeri Bengkulu  
Jl. Raden Fatah, Bengkulu, Indonesia

### **Abstract: Divided Education: Analyzing the Position of Islamic Religious Colleges in the National Education System**

The purpose of this paper is to examine the higher education system in Indonesia and its implications for its scientific characteristics. Using library research (literature study), which is how to collect data and information from books and scientific journals related to research objects that are discussed descriptively-analytically through philosophical studies with a qualitative-rationalistic approach. The results of the study of this paper show that first, the dichotomy between science and religion which is then followed institutionally, is the remnants of Dutch colonial politics. Where it was deemed incompatible with the science developed in Dutch schools. Second, Islamic educational institutions, especially Islamic boarding schools, which were originally places for religious learning and a means of resistance to colonialism, experienced institutionalization and continued to distance themselves from science and technology studies. Islamic education is more dominant as a conservation of schools and beliefs than as a center for scientific and technological studies.

**Keyword:** education, dualism, science, religion PTKIN

### **Abstrak: Pendidikan Terbelah: Telaah Posisi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional**

*Tujuan dari penulisan ini adalah mengkaji sistem pendidikan tinggi di Indonesia dan implikasinya terhadap karakteristik keilmuannya. Menggunakan library research (studi pustaka), yaitu cara mengumpulkan data-data dan informasi dari buku-buku serta jurnal-jurnal ilmiah yang terkait dengan objek penelitian yang dibahas secara deskriptif-analitik melalui kajian secara filosofis dengan pendekatan kualitatif-rasionalistik. Hasil kajian paper ini menunjukkan bahwa pertama, dikotomi antara sains dan agama yang kemudian diikuti dengan secara kelembagaan, adalah sisa-sisa politik pecah belah kolonial Belanda. Di mana dianggap tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dikembangkan di sekolah-sekolah Belanda Kedua, lembaga pendidikan Islam terutama pesantren yang semula sebagai tempat belajar agama dan alat perlawanan terhadap kolonial, mengalami institusionalisasi dan terus menjaga jarak dengan kajian sains dan teknologi. Pendidikan Islam lebih dominan sebagai konservasi mazhab dan keyakinan dari pada sebagai pusat kajian keilmuan dan teknologi.*

**Kata Kunci:** pendidikan, dualisme, sains, agama PTKIN

*To cite this article:*

Iqbal, M. (2020). Pendidikan Terbelah: Telaah Posisi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional. *At-Ta'lim: Media Informasi Pendidikan Islam*, 19(2), 287-302. <http://dx.doi:10.29300/atmipi.v19.i2.3576>

**A. PENDAHULUAN**

Semenjak Amin Abdullah memperkenalkan Keilmuan Sarang laba-laba, yang lebih dikenal dengan paradigma keilmuan integrasi interkoneksi, diskursus penggabungan kutub-kutub ilmu yang praktis dilaksanakan dalam sistem pendidikan di Indonesia, terus berkembang. Kutub ilmu agama satu sisi dan kutub ilmu non-agama di sisi lain. Pengkutupan ini oleh banyak ahli sangat mengganggu dan terus dikritisi. Bahkan oleh banyak kalangan, pengkutupan ini disinyalir menjadi pangkal dari keterbelakangan peradaban islam, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kegelisahan ini bukan tanpa alasan. Hingga memasuki abad 21, peradaban Islam hampir tertinggal dalam segala bidang. Ilmu pengetahuan, teknologi, art, sport dan bidang-bidang lainnya. Tragisnya lagi, dunia Islam malah sibuk konflik dan kekerasan, ketertinggalan pendidikan dan kemiskinan.

DW Indonesia (2017), dari 57 negara islam, hanya 1% kontribusinya terhadap kemajuan sains dan teknologi. Data ini menunjukkan, betapa rendahnya kontribusi Islam terhadap dunia sains. 1,6 Milyar masyarakat Islam di muka bumi ini, bukanlah angka sedikit, namun dari sekian banyak tersebut nyaris tidak terdengar kontribusinya, terutama terkait dengan pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi.

Abad keemasan Islam yang demikian diagungkan, berlangsung dari abad ke 8-12 M menjadi inspirasi dan spirit menjadikan ilmu pengetahuan dan pilar utama dalam membangun peradaban. dan tentu dengan mengintegrasikan interkoneksi agama dan sains. Selalu menjadi cerita dan romantisme masa lalu, yang terus di sebar berulang-ulang, bahwa nenek moyang Islam-lah yang

berjasa dan menjadi fondasi bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Barat.

Sebagian besar kelompok Islam masih tidak menyadari, sudah sekian jauh tertinggal kemajuan sains dan teknologi yang dipelopori dunia Barat. Masih asik dengan romantisme masa lalu dan tiada lelah menyebar ke semua generasi, semua kalangan bahwa Islam-lah yang paling berjasa dalam perkembangan sains di dunia.

Pendidikan tinggi agama dalam lingkungan PTKI (perguruan tinggi keagamaan Islam) yang diharapkan menjadi kawah candradimuka, tempat bersemainya para ilmuwan Muslim, yang akan membawa nama harum peradaban Islam, juga tidak kunjung nampak. Meminjam istilah Akh Minhaji (2004), masih berkuat pada kajian keislaman yang sempit. Sedangkan sains dan teknologi yang juga banyak sekali terdapat dalam al-Qur'an, malah terabaikan. Seperti dalam Tasmara (2004), mengklasifikasi kandungan Alquran sebagai berikut:

NO	KLASIFIKASI SURAT	JUMLAH SURAT	PROSENTASE
1	Fenomena Alam dan Materi	32	26.66 %
2	Aqidah dan Aliran Pemikiran	29	24.14 %
3	Sosial dan Politik	27	22.5 %
4	Sejarah dan Filsafat Sejarah	17	14.14 %
5	Perilaku dan Akhlak	4	3.3 %
6	Masalah Harta	4	3.3 %
7	Ibadah dan Syiar Agama	2	1.7 %

Klasifikasi tersebut semakin mempertegas bahwa pemihakan Alquran terhadap ilmu pengetahuan dan sains sangatlah menonjol. Menjadi tugas penting untuk mengembalikan perhatian kepada Sains dan Teknologi bagi umat Islam, dengan tanpa mengabaikan disiplin ilmu-ilmu lainnya.

Terlebih lagi sistem pendidikan tinggi nasional terjadi dualisme, yaitu lembaga pendidikan keagamaan di bawah induk kementerian agama, dan

lembaga pendidikan umum di bawah Ristekdikti. Pengkutupan sistem pendidikan boleh jadi kelanjutan sejarah, baik sejarah umat Islam pada khususnya maupun sejarah bangsa Indonesia pada umumnya. Di samping itu, wacana dikotomi pendidikan juga menguat kembali akibat gejolak politik nasional yang bermuatan ideologi tertentu. Dari zaman sebelum kemerdekaan hingga kini telah terjadi perseteruan politik antara kelompok nasionalis sekuler dan nasionalis religious (Islam). Kedua kelompok yang bersebrangan visi ini saling berebut pengaruh untuk menaklukkan dan sekaligus menguasai sistem konstitusi Negara. Akibatnya masing-masing berusaha melegitimasi ideologi tertentu, malah kalau perlu secara konfrontatif dengan melakukan proses pelembagaan formal (Muarif 2008, hal 28).

Dualisme pendidikan tinggi yang sudah berlangsung semenjak prakemerdekaan hingga sekarang dinilai sebagai salah satu pemicu kampus menjadi jumud dan tertatih-tatih mengikuti laju sains dan teknologi. Menjadi sangat menarik untuk ditelaah lebih lanjut 'pertikaian' antara sains dan agama dalam sistem pendidikan nasional.

## **B. METODE**

Penelitian ini dilakukan pada 2018-2019, dengan metode penulisan ini menggunakan *library research* (studi pustaka), yaitu yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dan informasi dari buku-buku serta tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan objek penelitian yang dibahas secara deskriptif-analitik melalui kajian secara filosofis dengan pendekatan kualitatif-rasionalistik.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **C. 1. LAHIRNYA PTKI**

Keinginan untuk mempunyai perguruan tinggi sendiri yang bercorakkan keagamaan Islam sebenarnya sudah muncul sebelum masa kemerdekaan. Hingga pada 27 Rajab 1364 (8 Juli 1945) Sekolah Tinggi Islam (STI) resmi didirikan di Jakarta dan dinahkodai oleh Moh Hatta, yang satu bulan

kemudian menjadi proklamator RI. Gejolak politik kemudian terjadi perpindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Jogjakarta, juga membawa STI turut pindah Seiring dengan pindahnya ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta, maka tanggal 10 April 1946 STI juga pindah dan dibuka di Yogyakarta. Dalam rangka mengembangkan peran dan fungsinya, maka STI tersebut diubah menjadi Universitas dengan nama Universitas Islam Indonesia (UII), yang secara resmi dibuka pada tanggal 27 Rajab 1367 (10 Maret 1948).

Visi awal STI sebenarnya sudah sangat tepat, yaitu ‘bertemu agama dengan ilmu dalam suasana kerjasama untuk membimbing masyarakat ke dalam kesejahteraan” (Makhfudh MD, 1987, hal. 307-316). Namun dalam perjalanannya STI lebih berorientasi “keagamaan”. Boleh jadi karena mengadopsi kurikulum Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar (Mesir). Pada perkembangan selanjutnya Visi tersebut mengalami perubahan setelah menjadi UII, yang tidak hanya fokus pada ‘islamic studies’ namun juga ilmu-ilmu umum seperti teknik, ekonomi, hukum, dan kedokteran, meskipun tetap berlandaskan nilai-nilai agama (Mochtar, 2003, hal. 31).

Pada tanggal 19 Desember 1949, sebuah Perguruan Tinggi Negeri yang dikenal sebagai hadiah untuk kelompok nasional, yang kemudian dikenal sebagai Perguruan Tinggi Umum yaitu UGM. Untuk kelompok Islam, kemudian didirikan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) yang berasal dari Fakultas Agama di UII. PTAIN ini diresmikan pada tanggal 20 September 1951, di Yogyakarta dengan visi : “Untuk memberi pengajaran tinggi dan menjadi pusat memperkembangkan dan memperdalam ilmu pengetahuan tentang agama Islam, dan untuk tujuan tersebut diletakkan azas untuk membentuk manusia susila dan cakap serta mempunyai keinsyafan bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat Indonesia dan dunia umumnya atas dasar Pancasila, kebudayaan, kebangsaan Indonesia dan kenjataan”. Sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, kemudian juga didirikan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) di Jakarta pada

tanggal 01 Juni 1957, dengan Visi : "Guna mendidik dan mempersiapkan pegawai negeri yang akan mencapai ijazah pendidikan semi-akademi dan akademi untuk dijadikan ahli didik agama pada sekolah-sekolah lanjutan, baik umum, maupun kejuruan dan agama". Visi akademik PTI di Indonesia terus mengalami perubahan dan perkembangan. Setelah memperhatikan situasi sosial kemasyarakatan waktu itu, maka kemudian PTAIN dan ADIA dilebur menjadi satu lembaga PTI dengan nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang diresmikan pada tanggal 24 Agustus 1960 di Yogyakarta. Pada saat diresmikan, visi IAIN ini adalah "Untuk memberi pengajaran tinggi dan menjadi pusat untuk memperkembangkan dan memperdalam ilmu pengetahuan tentang agama Islam". Yang menarik, terdapat sejumlah data sejarah yang semakin memperjelas visi atau arah ke depan orientasi akademik dari lembaga yang baru itu. Wasil Aziz (sekretaris pertama Senat Institut), misalnya menulis: "Perkembangan PTAIN dan ADIA menjadi IAIN memang sudah sewajarnya, karena mengingat bahwa perguruan tinggi tersebut telah berkembang dan tidak dapat lagi dimasukkan dalam satu fakultas. Perkembangan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat diarahkan pertumbuhan selanjutnya ke arah Universitas Al- Azhar". Sedangkan pada Peraturan Presiden No. 11 Tahun 1960, pasal2 ditulis: "Institut Agama Islam Negeri tersebut bermaksud untuk memberi pengajaran tinggi dan menjadi pusat untuk memper- kembangkan dan memperdalam ilmu pengetahuan tentang agama Islam", yang pada bagian Penjelasan Umumnya disebutkan: "Perkembangan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri sudah sedemi- kian rupa, hingga dapat diarahkan pertumbuhannya itu ke arah Al-Azhar". Terakhir dalam Surat Penetapan Menteri Agama No. 43 Tahun1960, Pasal 1 ditegaskan: "Institut Agama Islam Negeri adalah suatu institut yang bermaksud untuk memberi pengajaran dan pendidikan universitas serta menjadi pusat untuk memperkembangkan dan mem- perdalam ilmu pengetahuan tentang Agama Islam" (Minhaji, 2007).

Hingga tahun 1990, semenjak transformasi dari PTI, kemudian berubah menjadi UII, dan memecahkan diri menjadi IAIN sebagai perguruan tinggi Islam negeri, fokus kajian pada ilmu-ilmu agama, karena kiblat kurikulum pada Universitas Al Azhar Mesir semata. Kemudian PTI menjadi bagian atau di bawah naungan Departemen Agama. Sedangkan Perguruan Tinggi Umum (seperti UGM) berada di bawah naungan Departemen Pendidikan. Dualisme pendidikan antara sains dan agama menjadi tidak terhindarkan.

Setelah sekian lama berjalan PTAI seolah asik dengan dengan dirinya sendiri dan abai dengan perkembangan sains dan teknologi yang demikian melaju kencang. PTAI masih berkuat pada kajian keislaman yang sempit, terperangkap pada urusan 'khilafiyah', fenomena ini memunculkan keprihatinan para ilmuwan PTAI. Terlebih lagi banyak sekali yang baru pulang dari pendidikan barat. Gagasan-gagasan segar bermunculan agar perguruan Tinggi Islam juga berkontribusi dalam dalam perkembangan sains dan teknologi. Muncullah istilah "IAIN *with wider-mandate*", atau "IAIN dengan mandat yang diperluas". Sejak itu, IAIN yang semula berkonsentrasi pada ilmu agama mulai merambah bidang-bidang studi yang selama ini dikenal dengan ilmu umum atau ilmu sekuler.

Lebih fundamental lagi lahirnya Universitas Islam Negeri (UIN). UIN ini merupakan hasil transformasi IAIN yang secara kelembagaan berupa Institut menjadi Universitas. UIN (Yogyakarta, Jakarta, Malang, Riau, Makassar dan Bandung dan beberapa IAIN lainnya yang sudah menyusul). Artinya ilmu-ilmu umum yang dulunya tabu masuk PTKI, akan masuk deras ke ruang-ruang PTKI. UIN tidak lagi seperti IAIN, di dalamnya bukan hanya menekuni ilmu agama tetapi juga ilmu umum. Prodi-Prodi ilmu agama berada di bawah naungan Departemen Agama, sementara Prodi-Prodi umum berada di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional. Perkembangan ini menarik untuk dicermati, karena memberi gambaran semakin jelas pentingnya "pendidikan satu atap" yang sudah didengungkan sejak lama oleh sejumlah pakar

pendidikan di Indonesia. Jika Pemerintah sudah berhasil menjadikan "satu atap" Peradilan Agama dengan Peradilan Umum (juga peradilan lainnya), maka tinggal diteruskan ke arah "pendidikan satu atap", sehingga menghindari kebingungan birokrasi sebagaimana dialami selama ini. Bahkan tahap awal ke arah satu atap sudah mulai kelihatan dengan adanya kesempatan bagi Perguruan Tinggi Islam untuk membuka Prodi ilmu umum, dan sebaliknya Perguruan Tinggi Umum untuk membuka Prodi ilmu agama. Kecenderungan ini perlu diantisipasi secara positif dan kreatif oleh lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia saat ini (Minhaji, 2007).

## C.2 AKAR PENGKUTUPAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

Dalam konteks Indonesia, Pengkutuban antara sains dan agama, mempunyai akar yang panjang. Masuknya Islam yang dibarengi dengan proses pendidikan melalui kontak pribadi, yang kemudian dilanjutkan dengan kelembagaan semacam Masjid (Yunus, 1979, hal. 60-62) Surau di Minangkabau, Dayah Aceh dan Pesantren di Jawa, yang mengkhususkan pendidikan Islam klasik seperti tafsir, falak, fiqh dan lainnya. Tidak berselang lama, Kolonialisme yang panjang, yang diiringi dengan penyebaran agama Kristen, dan proses pendidikan yang mengajarkan ilmu hitung, alam dan kemudian dikenal dengan ilmu-ilmu umum, menjadi kutub sendiri yang kemudian membelah pendidikan tanah air.

Pendidikan Islam yang sedemikian rupa sangat kontras dengan pendidikan model Eropa yang dibangun oleh pemerintah kolonial. Pendidikan kolonial yang sekuler, yang memisahkan secara tegas antara sains dan agama, tidak mengajarkan sama sekali ilmu agama di sekolah pemerintah. Begitu pula sebaliknya, pendidikan Islam di masa itu tidak mengajarkan sama sekali ilmu-ilmu umum. Kenyataan ini membuat terpolanya pendidikan di Indonesia saat ini dengan dua sistem yang saling bertolak belakang (Hasan, 2011, hlm. 4-5).

Pandangan lain, terkait dengan meredupnya peradaban Islam yang berlangsung semenjak abad ke 12, yang pada saat yang sama Islam mulai

masuk dan menyusup di wilayah nusantara. Pola keilmuan agama yang spesifik-parsialistik, rigid-dikotomik yang kemudian diadopsi oleh proses pendidikan nusantara dan berimplikasi pada lepasnya aspek historis dan kontekstual. Penyebaran Islam yang dibawa oleh kaum pedagang, dan beberapa kelompok pendakwah.

Karel A. Steenbrink, Indonesianis asal Belanda yang lama tinggal di tanah air mendapati bahwa asal usul sistem pendidikan yang dualistik di Indonesia telah bermula sejak zaman kolonial Belanda hingga berlanjut ke zaman kemerdekaan. Penolakan politik pemerintah kolonial penjajah untuk menyesuaikan diri dan menggabungkan sistem pendidikan agama Islam seperti pondok pesantren yang telah ada sebelumnya menjadi dasar untuk mengembangkan sekolah-sekolah umum menjadi salah satu sebab wujudnya sekolah-sekolah yang menggunakan sistem pendidikan kolonial (Steenbrink, 1986. hal. 3).

Dalam catatan Steenbrink, mengutip pernyataan J.A. Van der Chijs, Belanda mengangkat seorang inspektur pendidikan pribumi pertama yang dilantik dalam kalangan pegawai pemerintah kolonial Belanda, yang menyatakan bahwa "Walaupun saya sangat setuju kalau sekolah pribumi diselingi dengan kebiasaan peribumi, namun saya tidak menerimanya kerana kebiasaan tersebut terlalu jelek, sehingga tidak dapat dipakai dalam sekolah pribumi." Para sarjana kolonial pada masa itu menyatakan bahwa tradisi didaktik pendidikan pribumi seperti membaca teks arab dan penggunaan kaedah hafalan tidak dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan suatu sistem pendidikan umum (.Steenbrink, 1983: hal 3).

Maka didirikanlah sejumlah sekolah Kristen di Minahasa Sulawesi dan Maluku yang sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah dan manajemennya dilaksanakan oleh para zending kristian. Sama seperti lembaga pendidikan Islam, sekolah ini pada awalnya hampir seratus persen memusatkan diri pada pendidikan agama kristian. Walau guru-guru setempat yang mendapatkan

pendidikan dari lembaga tersebut bertujuan untuk mempersiapkan pemimpin-pemimpin agama bagi masyarakat setempat, namun bagi penjajah kolonial sekolah ini lebih mudah penggabungannya untuk memasukkan sekolah tersebut ke dalam sistem sekolah umum berbanding lembaga pendidikan Islam seperti pesantren. Hal itu antara lain karena disebabkan murid di sekolah umum sudah terbiasa dengan tulisan romawi dibandingkan dengan tulisan dan Bahasa Arab. Faktor lain juga adalah disebabkan oleh adanya hubungan organisasi yang bersifat kepentingan ideologis antara pemerintah kolonial dan zending dibandingkan dengan Islam (Suyatno, 2012).

Dari sinilah kemudian pengkutupan anatara agama dan sains mengalami polarisasi hingga sekarang. Pihak yang menolak kebijakan kolonial atau sistem pendidikan umum mendirikan sekolah-sekolah agama dan pesantren-pesantren sekaligus sebagai simpul-simpul perlawanan terhadap kolonial di tingkat lokal. Sementara Belanda terus melanjutkan sistem pendidikan umum, yang tidak memasukkan unsur-unsur agama di dalamnya.

Dalam perkembangannya, sistem hafalan sebagaimana pada masa-masa awal pendidikan Islam di Nusantara, hingga sekarang malah semakin diminati. Tidak sebatas di tingkat pendidikan menengah, PTAIN juga giat-giatnya mengembangkan ma'had yang di dalamnya juga tidak jauh dari sistem hafal menghafal. PTN juga memberi perlakuan istimewa dengan memberikan jalur khusus bagi penghafal al quran.

### **C.3 MENYANDINGKAN SAIN DAN AGAMA**

Berawal dari Kegelisahan para akademisi UIN Maliki Malang (pengalaman penulis dengan Imam Suprayogo) semacam Imam Suprayogo ketika masih menjadi STAIN, banyak mahasiswanya yang tidak mampu membaca al Qur'an. Maka didirikanlah asrama atau semacam pesantren yang harus diikuti oleh mahasiswa baru. Para mahasiswa baru angkatan pertama diwajibkan masuk asrama pada tahun pertama, terutama bagi mahasiswa yang ingin belajar membaca al Qur'an dan tidak bisa membaca al Qur'an. Tidak

sekedar mampu membaca, pada level selanjutnya, para mahasiswa juga di harapkan mampu membaca teks arab atau bahkan mampu berbahasa arab.

Fenomena di Malang tersebut ternyata juga menjadi gejala umum di seluruh PTAI se Indonesia. Seiring dengan semakin terbukanya STAIN, IAIN dan UIN, input mahasiswa menjadi sangat beragam. Bahkan banyak yang berasal dari sekolah umum ketimbang sekolah agama dan pesantren, sehingga para mahasiswa di lingkungan PTAI banyak yang tidak bisa membaca al Quran.

Wilayah Bengkulu sendiri, jumlah pesantren atau sekolah keagamaan (Islam) sangat terbatas. Pendidikan formal banyak di dominasi oleh sekolah umum dan kejuruan. Maka bisa diperkirakan, mahasiswa baru yang tidak kurang dari 2000 mahasiswa, bisa dipastikan sebgayaan besar dari sekolah umum, non MA dan non Pesantren. Demikian juga di PTAIN lainnya, seiring dengan semakin tingginya minat calon mahasiswa di PTAIN, juga sangat terbatas alumni sekolah keagamaan yang bisa terakomodir di PTAIN. Selebihnya dapat dipastikan dari sekolah umum.

Kajian keilmuan yang semakin luas, yang tidak terbatas pada kajian keislaman semata, menjadikan PTAIN mempunyai ceruk pasar yang semakin beragam. Kalau dahulu hanya sebatas dari madrasah dan pesantren dan mahasiswa pedesaan, sekarang, bergeser ke arah calon mahasiswa sekolah umum dan kaum urban.

Pendidikan Islam masih cenderung tidak berubah sejak jaman periode masuknya Islam ke nusantara dan masa kolonialisme Hindia Belanda, yang dikatakan "penggunaan kaedah hafalan tidak dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan suatu sistem pendidikan umum" (Steenbrink, 1986) . Metode hafalan teks-teks agama dengan jaminan masuk surga masih menjadi daya tarik yang menggiurkan bagi wali murid dan murid itu sendiri. Pendidikan tektualis doktriner masih sangat kental dalam sistem pendidikan Islam kontemporer di Indonesia.

Universitas Al Azhar Mesir hingga sekarang, masih mensyaratkan calon mahasiswanya menghafal al Qur'an sekian juz untuk menjadi mahasiswa Al Azhar. Artinya, jangan-jangan metode hafalan ini juga terjadi dalam sistem pembelajaran di banyak dunia Islam. Maka akan dapat diperkirakan kualitas pendidikan yang menekankan hafalan adalah pengkerdilan kekuatan imajinasi (Kompas 20 des 2016) peserta didik.

Dengan realitas semacam ini, gagasan integrasi antara sains dan agama semakin mendapat tantangan lebih berat lagi. Alih-alih terjadi integrasi, antara sains dan agama malah terjadi polarisasi yang semakin menjauh. Banyak lembaga pendidikan yang kebanjiran siswa, bahkan banyak menolak, karena salah satunya menawarkan garansi anak didiknya mampu menghafal al Qur'an sekian juz.

Demikian juga Amin Abdullah yang dikenal sebagai pelopor gagasan integrasi interkoneksi keilmuan antara sains dan agama. Sebelum menyodorkan gagasan integrasi, Amin terlebih dahulu pertama yang dikritisi Amin Abdullah adalah gagasan pembaruan dari para modernis Muslim dari berbagai belahan dunia. Menurut penilaiannya, klaim para pemikir modernis, seperti Abduh, Iqbal, Harun Nasution, dan Sutan Takdir, tentang keterbelakangan umat Islam dan mengusulkan "rasionalisasi" dan "meniru Barat" sebagai solusi untuk menyamai Dunia Barat, tidak seluruhnya menguntungkan umat Islam. Gagasan tersebut ternyata, selain tidak menyelesaikan persoalan, justru yang terjadi adalah menguatnya pandangan atas superioritas bangsa Barat dan inferioritas bangsa Timur, khususnya umat Islam. Lebih jauh, pandangan tersebut telah membentuk sikap menyesali dunianya dan agamanya. Jadi, cita-cita untuk menyaingi dunia Barat malah berefek menguatkan Barat (Abdullah, 2006: h. 5-6).

Amin Abdulah juga melihat bahwa bangunan keilmuan Islam yang *single entity* atau semacam monodisiplin keilmuan, yang hanya fokus pada kajian keilmuan tertentu dan sedikit melibatkan disiplin keilmuann lain, sudah mengakar

di kalangan akademisi Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI). Ia merasakan keluhan masyarakat terhadap alumni PTAI yang hanya mengetahui soal-soal “normatifitas” agama sendiri, tetapi kesulitan memahami historisitasnya, apalagi historisitas agama orang lain. Kenyataan ini berkaitan dengan persoalan pokok tentang titik perpaduan antara “ilmu” dan “agama”. Bangunan keilmuan yang diajarkan di PTAI masih mengikuti model *single entity* atau *isolated entities*, dan belum mau menerima atau belum mampu menerapkan model *interconnected entities*. Pada level praksis, mahasiswa dan dosen pada bidang *natural sciences* tidak mengenal isu-isu dasar *social-sciences*, dan *humanities* dan lebih-lebih *religious studies* dan begitu sebaliknya. Keterpisahan ini hanya akan mencetak ilmuan dan praktisi yang tidak berkarakter. Indonesia dan dunia ketiga pada umumnya yang mengikuti begitu saja pola keilmuan tersebut tanpa modifikasi, sehingga menggiring ke arah krisis multi-dimensional sejak dari lingkungan hidup, ekonomi, politik, sosial, agama, moral yang berkelindan.

Kerangka keilmuan yang ditawarkan Amin Abdullah



Kerangka ini menjelaskan dari teori spider web keilmuan ini adalah penempatan al-Qur’an di tengah kompleksitas perkembangan keilmuan. Ini

suatu penegasan yang penting bagi setiap Muslim, sebab al-Qur'an itu diyakini sebagai sumber kebenaran, etika, hukum, kebijaksanaan, dan pengetahuan. Sekalipun demikian, Amin Abdullah menegaskan, Islam tidak pernah menjadikan wahyu Tuhan sebagai satu-satunya sumber pengetahuan dan melupakan Tuhan. Menurut pandangan ini, sumber pengetahuan itu dua macam, yaitu yang berasal dari Tuhan dan yang berasal dari manusia. Perpaduan antara keduanya itulah yang disebut teoantroposentrisme. Perpaduan itu sekaligus merefleksikan semangat dediferensiasi. Dengan merujuk Kuntowijoyo, Amin Abdullah menyatakan bahwa modernisme yang menekankan diferensiasi dalam berbagai bidang kehidupan sudah tidak sesuai lagi dengan semangat zaman. Dalam konteks posmodern dan upaya membangun keilmuan, perlu sekali adanya gerakan resakralisasi, deprivatisasi agama dan ujungnya adalah dediferensiasi (rujuk kembali). Kalau diferensiasi menghendaki pemisahan antara agama dan sektor-sektor kehidupan lain, maka dediferensiasi inilah penyatuan kembali agama dengan sektor-sektor kehidupan lain, termasuk agama dan ilmu (Siregar, 2014).

Paradigma keilmuan baru yang digagas Amin Abdullah ini bersifat menyatukan, bukan sekedar menggabungkan, wahyu Tuhan dan temuan pikiran manusia (ilmu-ilmu holistik-integralistik). Penyatuan seperti ini tidak akan berakibat mengecilkan peran Tuhan (sekularisme) atau mengecilkan manusia sehingga teralienasi dari dirinya sendiri, dari masyarakat sekitar, dan lingkungan hidup sekitarnya. Dengan demikian, konsep integralisme dan reintegrasi epistemologi keilmuan ini sekaligus akan dapat menyelesaikan konflik antar sekularisme ekstrim dan fundamentalisme negatif agama-agama yang kaku dan radikal dalam banyak hal (Abdullah, 2002).

#### **D. KESIMPULAN**

Dua wajah pendidikan yang memisahkan antara lembaga pendidikan tinggi agama dan lembaga pendidikan tinggi umum, di mana masing-masing lembaga dinaungi oleh kementrian yang berbeda, membelah dunia pendidikan.

Meskipun belakangan semakin sulit dibedakan antara lembaga pendidikan tinggi agama atau lembaga pendidikan umum. Karena di dalamnya terdapat dua unsur lembaga pendidikan tinggi tersebut. Misalnya, UIN yang di bawah kementerian agama, fakultas dan prodi yang ada di dalamnya sangat umum *seculer science*. Demikian juga sebaliknya. Artinya, ke depan pendidikan tinggi satu atap sangat mungkin akan terjadi.

Bila merunut ke sejarah dikotomi pendidikan agama dan pendidikan umum adalah produk politik belah bambu kolonian Belanda, yang terinternalisasi ke dalam lembaga-lembaga formal pendidikan. Celakanya, setelah sekian lama berjalan, lembaga pendidikan agama malah terjebak pada kajian keilmuan yang sempit. Lebih parah lagi, banyak pendidikan tinggi keagamaan tidak lagi memerankan sebagai pusat kajian keilmuan dan keislaman, melainkan menjadi lahan kontestasi untuk kepentingan konservasi mazhab dan kelompok tertentu.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

Affandi Mochtar, (2003). *Perguruan Tinggi Islam di Indonesia: Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangannya* Jakarta: Departemen Agama.

Akh Minhaji, (2007). *Masa Depan Perguruan Tinggi Islam di Indonesia: Perspektif Sejarah Sosial* (Jurnal Tadris Vol 2 No 2, 2007)

Amin Abdullah, (2002). "Profil Kompetensi Akademik Lulusan Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Agama Islam Dalam Era Masyarakat Berubah", Makalah yang disampaikan dalam Pertemuan dan Konsultasi Direktur Program Pasca Sarjana Perguruan Tinggi Agama Islam, Hotel Setiabudi, Jakarta, 24-25 Nopember.

Amin Abudllah. (2006). *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

DW Indonesia adalah portal yang konsen terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalamnya juga terdapat banyak opini dari para ahli dari seluruh belahan dunia, serta memuat juga hasil reset tentang berbagai hal, terutama yang meyangkut isu-isu penting.

- Karel A. Steenbrink, 1986. *Pesantren, Madrasah, Sekolah* (Jakarta: LP3ES The Columbia Encyclopedia (1963) NY & London: Colombia University Press.
- Mahmud Yunus, (1979). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* Jakarta: Hidayakarya Agung.
- Moh. Mahfud M.D, (1987). "Kendala-kendala Pendidikan Islami di UII", *Setengah Abad UII Yogyakarta* : UII Press, 1987
- Muarif, (2008). *Liberalisasi Pendidikan*. Yogyakarta: Pinus Book Publisher.
- Noorhaidi Hasan, "Islamizing Formal Education: Integrated Islamic School and New Trend in Formal Education Institution in Indonesia" Artikel Online di S. Rajartanam School of International Studies Singapore, Februari 2011, hlm. 4-5
- Parluhutan Siregar, (2014). *Integrasi ilmu-ilmu keislaman dalam perspektif Amin Abdullah*, (MIQOT Vol. XXXVIII No. 2 Juli-Desember 2014)
- Suyatno, (2012). *Dekontruksi Pendidikan Islam Sebagai Subsistem Pendidikan nasional*. *Jurnal Pendidikan Islam* Volume I, Nomor 1, Jun.